

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk meringankan Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. BAPPEDA dibuat berlandaskan kebutuhan, pertumbuhan serta kemajuan di dalam Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Pemerintahan. Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu memberikan kewenangan, keleluasaan bagi Daerah agar bisa direncanakan dan ditetapkannya tentang kebijakan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut agar lebih mandiri didalam aspek perintis pembangunan daerah dapat memaksimalkan sumber daya dalam pembangunan daerah itu sendiri. Untuk mencapai misi tersebut, diperlukan perencanaan agar bisa menetapkan tujuan dan menentukan langkah apa saja yang diperlukan (Tarigan, 2004).

Perencanaan pembangunan daerah sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Mekanisme dalam perencanaan pembangunan, sangat dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan ialah membuat program pembangunan akurat sesuai arah yang dituju. Rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan

pengontrolan merupakan kepentingan dari perencanaan pembangunan. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang diatur Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggung jawab dalam pembentukan rencana, penentuan rencana, pengoperasian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah.

Tujuan dari perencanaan pembangunan yaitu agar dapat memaksimalkan penggunaan potensi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Akan tetapi, penerapannya tidaklah mudah, karena banyaknya masalah diantaranya terkait kurangnya konsistensi perencanaan dan materi hingga permasalahan di lapangan. Pemerintah daerah dalam perancangan dan pengaturan pembangunan sangatlah terbatas melihat kapasitas dari daerah yang berbeda. ( Bastian, 2006 )

Selain permasalahan di atas, setiap daerah pasti memiliki permasalahan yang spesifik. Perbedaan ini berdampak pada rencana pembangunan yang dilakukan pada daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan daerah sebaiknya bergantung pada permasalahan yang ada pada daerah tersebut. Akan tetapi sebenarnya permasalahan dari tiap daerah sering tidak sesuai dengan struktur perencanaan pemerintah. ( Bastian, 2006 )

Mekanisme penentuan prioritas perencanaan pembangunan, benar-benar diperlukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hal ini berguna sebagai dokumen perencanaan tahunan, jadi setiap daerah mesti mengadakan

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat propinsi, termasuk mengadakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Propinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). Semua data yang didapatkan dari Musrembang sangat diperlukan yang nantinya akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkaitan dalam pendanaan anggaran daerah.

Ciri-ciri pokok dari perencanaan umum meliputi aktifitas berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan di masa yang mendatang serta meliputi sebuah proses yang berurutan dan dapat di wujudkan sebagai konsep didalam sejumlah tingkatan. Tahapan ini terdiri dari identifikasi persoalan yang bertujuan agar dapat memudahkan bagaimana pembangunan yang akan di selenggarakan, perumusan tujuan umum dan sarana khusus sampai dengan target yang kuantitatif, proyeksi keadaan dimasa mendatang, pencairan dan penilaian berbagai pilihan, penyusunan rencana terpilih merupakan tahapan yang terakhir. Suatu perencanaan pembangunan sangatlah berguna demi membangun suatu daerah, sehingga penulis tertarik magang pada BAPPEDA dan juga penulis ingin menambah pengalaman dalam berbagai bidang pada instansi ini melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka menggunakan keprofesian dalam bidang ilmu tertentu. Berdasarkan landasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah yaitu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan pada BAPPEDA Kota Padang dengan judul **“Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan pada BAPPEDA Kota Padang”** Dengan harapan dapat memahami bagaimana proses Mekanisme Perencanaan Pembagunan Daerah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kota Padang adalah :

1. Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan serta prioritas pembangunan Kota Padang pada BAPPEDA Kota Padang?
2. Permasalahan apa yang di hadapi oleh BAPPEDA dalam proses penentuan prioritas perencanaan pembangunan pada BAPPEDA?

## 1.3 Tujuan Magang

1. Mengetahui bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan serta prioritas pembangunan pada BAPPEDA Kota Padang.
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam proses penentuan prioritas perencanaan pembangunan Kota Padang.

## 1.4 Manfaat Magang

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan serta permasalahan yang dihadapi dalam penentuan prioritas dalam perencanaan pembangunan
2. Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang teori-teori yang berhubungan dengan mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan
3. Dapat menjadi perbandingan antara teori dan praktek perencanaan pembangunan daerah.
4. Memperkenalkan peserta magang pada dunia kerja sehingga dapat memiliki wawasan dan pengalaman.

5. Menambah keterampilan mahasiswa yang tidak dapat di bangku kuliah

### **1.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang**

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, penulis melakukan kegiatan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang selama 40 hari kerja yang dimulai dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 4 Agustus 2017. Dalam pelaksanaan magang penulis ditempatkan pada bagian Umum. Selama kegiatan magang berlangsung penulis berupaya mempelajari dan memahami bagaimana proses menginput daftar belanja serta menyusun surat masuk dan surat keluar yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Padang.

### **1.6 Sistematis Penulisan**

Sistematis penulisan Laporan Magang ini dibagi atas lima bab yang masing-masing bab saling berhubungan satu sama lainnya.

Sistematika penulisan Laporan Magang ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat, Tempat dan Waktu magang dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memaparkan tentang landasan teori yang terdiri dari: pengertian perencanaan, pengertian pembangunan, pengertian pembangunan daerah, pengertian perencanaan pembangunan daerah, mekanisme perencanaan, tahap-tahap proses perencanaan pembangunan, pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan,

unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan, dasar hukum, dan mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan.

### BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menggambarkan tentang, gambaran umum Kota Padang, gambaran umum dari BAPPEDA Provinsi Kota Padang, visi dan misi BAPPEDA Kota Padang, tugas Pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Padang, struktur organisasi BAPPEDA Kota Padang, sarana dan prasarana serta Mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan BAPPEDA Kota Padang.

### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan, tentang hasil yang telah penulis dapatkan saat mengikuti kegiatan magang yang berkenaan dengan mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan pada BAPPEDA Kota Padang.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan, kesimpulan dari laporan yang terkait dengan tujuan pembuatan laporan dan saran yang dapat diberikan sehingga memberikan masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.